

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN**



**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH DAN OPINI AUDIT
BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA
KEUANGAN DAERAH**

(Studi Empiris LKPD Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat)

Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

TIM PENGUSUL:

**Siska Yulia Defitri, SE. M.Si / 1023078301 / Ketua
Witra Maison, SE. M.Si / 1022026304 / Anggota**

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK
AGUSTUS 2019**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Badan Pemeriksaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Empiris LKPD Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat)

Peneliti/Pelaksana
Nama Lengkap : Siska Yulia Defitri, SE. M.Si
NIDN : 1023078301
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Nomor HP : 085355066166
Alamat surel (e-mail) : siskayd023@gmail.com
Anggota Tim
Nama Lengkap : Witra Maison, SE. M.Si
NIDN : 1022026304
Perguruan Tinggi : Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
Tahun Pelaksanaan : 2019
Sumber Dana : Mandiri
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 6.500.000,-
Biaya Keseluruhan : Rp. 6.500.000,- (Mandiri)

Solok, 02 Agustus 2019

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



(~~Juita Surkraini~~, SE. M.Si)

NIDN. 1017116201

Ketua,

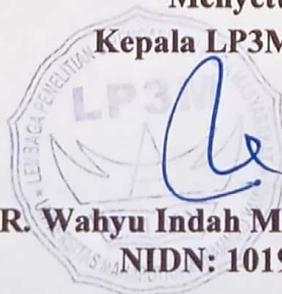


(Siska Yulia Defitri, SE. M.Si)

NIDN. 1023078301

Menyetujui,

Kepala LP3M UMMY



(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE. MM)

NIDN: 1019017402

DAFTAR ISI

RINGKASAN	1
1. PENDAHULUAN	2
2. LANDASAN TEORI.....	5
3. METODE PENELITIAN.....	30
4. PEMBAHASAN	37
5. PENUTUP.....	57
6. DAFTAR PUSTAKA	59

LAMPIRAN

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH DAN OPINI AUDIT BADAN
PEMERIKSAAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH
(STUDI EMPIRIS LKPD KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI SUMATERA
BARAT)**

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat, dan (2) Pengaruh Opini Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat, Ukuran Pemerintah Daerah dan Opini Audit BPK secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat .

Populasi penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan pemerintah daerah di Seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat yang telah diperiksa BPK RI dengan jumlah 19 pemerintah daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data Sekunder. Teknik pengumpulan data dengan teknik metode dokumentasi, yaitu berupa laporan keuangan kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat. Uji prasyarat yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat yang ditunjukkan dengan t hitung = 4,719 signifikansi 0,000, (2) Opini Audit BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat ditunjukkan dengan t hitung = 1,835 signifikansi 0,075, Ukuran Pemerintah Daerah dan Opini Audit BPK secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat di tunjukkan dengan F hitung = 12,869 dan signifikansi 0,000 dan R Square 0,424 atau 42,4%.

Kata Kunci: Ukuran Pemerintah Daerah dan Opini Audit BPK dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah seperti tertuang dalam UU No. 32/2004 pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kebijakan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan wewenangnya, pemerintah daerah diberi keleluasan untuk menggali sumber penerimaan berupa pendapatan sendiri yang berasal dari potensi yang ada di daerah. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini akan terwujud jika daerah mampu meningkatkan pelayanan dan membiayai pembangunan dari sumber pembiayaan sendiri. Namun, pada kenyataannya di Indonesia pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat.

Peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu cara dalam meningkatkan rasio kemandirian dalam suatu pemerintah daerah. Salah satu pengukuran kinerja yang dapat menggambarkan kinerja pemerintah daerah adalah mengukur kinerja keuangan (Sari, 2016). Kinerja keuangan adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan pelayanan yang diinginkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah daerah dan pihak eksternal. Data pengukuran kinerja keuangan yang bersumber dari informasi finansial yang diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat, dapat menjadi peningkatan program selanjutnya demi menghasikan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas (Sari, 2016).

Ukuran pemerintah daerah menurut Sumarjo (2010) menggunakan total aset pemerintah daerah karena aset menunjukkan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan. Berdasarkan penelitian Sumarjo menggunakan total aset sebagai proksi untuk mengukur pemerintah daerah. Menurut Maiyora (2015) ukuran pemerintah daerah yang besar dapat membantu kegiatan operasional pemerintah daerah yang diiringi dengan meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah daerah yang memiliki ukuran aset besar memiliki tekanan yang besar untuk melakukan pengungkapan atas

laporan keuangannya. Kusumawardi (2012) menjelaskan ukuran yang besar dalam pemerintah daerah akan memberi kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 19 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, BPK memberikan opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 (Padang.bpk.go.id).

Opini audit merupakan pernyataan profesional sebagai sebuah kesimpulan yang dikeluarkan oleh pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Achmad, 2017). Opini merupakan informasi utama dari laporan audit. Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya (Angelina & Irsutami, 2012). Dari hasil penelitian Angelina & Irsutami (2012) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan penelitian Achmad (2017) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kinerja keuangan pemerintah sudah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu, akan tetapi masih sedikit penelitian yang menguji pengukuran pemerintah daerah dan opini audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Dengan penelitian ini penulis ingin mengetahui kinerja keuangan pemerintah sebagai variabel dependen, yang kedua ingin mengetahui pengukuran kinerja pemerintah daerah dan opini audit BPK sebagai variabel independen.

Dari uraian serta pemikiran di atas maka penulis merasa terdorong untuk meneliti tentang **“Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, dan Opini Audit Badan Pemeriksaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 - 2017”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat

2. Apakah opini audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat
3. Apakah ukuran pemerintah daerah dan opini audit BPK berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh opini audit Bpk terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk memperoleh bukti empiris terkait ukuran pemerintah daerah dan opini audit BPK berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai gambaran mengenai kondisi yang dapat mempengaruhi pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat, terutama dalam hal penyelenggaraan kinerja keuangannya. Dengan demikian dapat menjadi bahan evaluasi terkait kebijakan yang diambil.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan masukan dan bahan pertimbangan mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kinerja keuangannya.
3. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi peneliti tentang pengaruh ukuran pemerintah, dan opini audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota Sumatra Barat.

4. Bagi peneliti selanjutnya dapat memberi sumber referensi bagi peneliti yang lain, hal ini terkait masih terbatasnya penelitian di bidang sektor publik di Indonesia.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja Keuangan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Kinerja keuangan daerah adalah gambaran pencapaian pelaksanaan kegiatan kerja pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi daerah yang dinilai dengan aspek keuangan yang dilihat dari laporan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah daerah tersebut (Sari, 2016).

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaiannya tidak sesuai dengan apa direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek (Sularaso, 2011). Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut (Sularaso, 2011).

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi anggaran realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan

atau tertentu perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yaitu perbandingan antara realisasi pendapatan asli daerah dengan jumlah belanja rutin menurut (Nst, Rizky, 2017)

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2012).

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Pengukuran kinerja dapat diukur dengan *value for money* (Nilai uang) yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Bastian, 2010). Sedangkan menurut (Mashun, 2016) terdapat empat rasio yang dapat dijadikan tolak ukur dalam kinerja keuangan pemerintah yaitu rasio kemandirian, rasioekonomi, rasio efektivitas dan rasio efisiensi.

Mahsun (2016;179) mendefinisikan ekonomi sebagai cara menggunakan sesuatu hal secara hati-hati dan bijak agar diperoleh hasil yang baik. Efisiensi atau daya guna adalah bertindak dengan cara meminimalisir kerugian dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi yang tersedia (Mahsun, 2016;179). Masih menurut Mahsun (2016;179) yang mengartikan efektivitas sebagai pencapaian tujuan sehingga tidak dapat dipisahkan dari keterkaitan antara pencapaian tujuan dengan output yang dihasilkan.

Kinerja keuangan sebagai suatu indikator keuangan dan nonkeuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi. Pengukuran kinerja merupakan wujud akuntabilitas, dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus

dipenuhi, data pengukuran koneja dapat menjadi peningkatan program selanjutnya.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan aturan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Untuk mengukur kinerja keuangan dapat digunakan dengan beberapa rasio:

2.1.1 Rasio Kemandirian

Menurut Halim (2012;231) Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Halim (2012;232) Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{subsidi pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah}} \times 100\%$$

Rasio ini menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern dan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah yang akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Rasio Pertumbuhan

Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian Halim (2012;241). Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan adalah:

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100\%$$

Keterangan:

R = Rasio Pertumbuhan

P_n = Total Pendapatan daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P₀ = Total Pendapatan daerah/PAD/ Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada ke-0 (tahun sebelum)

Rasio pertumbuhan menggambarkan untuk mengevaluasi potensi- potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total pendapatan Daerah (TPD),PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya.

2.1.3 Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisiensi apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik Halim (2012;234).

Rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefisienkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut Halim (2012;234).yang menyatakan bahwa bila semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan}}{\text{realisasi pendapatan}} \times 100\%$$

Rasio ini menggambar perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterima sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak.

2.1.4 Rasio Efektivitas

Menurut Halim (2012;234) menyatakan bahwa Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Rumus Rasio Efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menggunakan Rasio Kemandirian karena banyak dari penelitian terdahulu yang menggunakan rasio kemandirian untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah agar dapat mengetahui bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumberpendapatan yang diperlukan daerah.

2.2 Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan pelaksanaan dan menanggung jawab semua kegiatan pemerintah yang di daerah otonomi. Yang menjasi peran utama dari pemerintah daerah adalah melaksanakan palayanan sebaik mungkin terhadap

kepentingan masyarakat dan melaksanakan sebagai usaha untuk memajukan daerah otonom tersebut.

Pemerintah daerah adalah salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah Provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah Provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang jadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wali kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta laranagan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyeenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksud dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu melakukan:

1. Desentralisasi menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah menjelaskan desentralisasi yang terdapat pada Pasal 1 angka 7 yang menyebut bahwa “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
2. Dekonsentrasi menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah menjelaskan dekonsentrasi yang terdapat pada Pasal 1 angka 8 yang berbunyi “Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.”
3. Tugas pembantuan menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dari urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintah daerah.

1. Urusan Pemerintah Absolut

Urusan pemerintah absolut adalah Urusan Pemerintah yang sepenuhnya

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah absolut, Pemerintah Pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada Instansi vertikal yang ada di daerah atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi. Urusan pemerintah absolut sebagai berikut:

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan fiskal nasional;
- f. Agama.

2. Urusan Pemerintah Konkuren

Urusan pemerintah konkuren adalah Urusan Pemerintah yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah Provinsi dan daerah kabupaten/kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategi nasional. Urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintah Wajib dan Urusan Pemerintah Pilihan.

a. Urusan Pemerintah wajib

Urusan pemerintah wajib terdiri dari atas Urusan pemerintah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan pemerintah wajib yang terkait dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan ;
- 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- 5) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Urusan pemerintah wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

- 1) Tenaga kerja;
- 2) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) Pangan ;
- 4) Pertanahan;
- 5) Lingkungan hidup;
- 6) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 7) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 8) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) Perhubungan ;
- 10) Komunikasi dan informatika;
- 11) Koperasi, usaha kecil da menengah;
- 12) Penanaman modal;
- 13) Kepemudaan dan olahraga;
- 14) Statistic;
- 15) Persandian;
- 16) Kebudayaan;
- 17) Perpustakaan; dan
- 18) Kearsipan.

b. Urusan Pemerintah Pilihan

 Urusan Pemerintah Pilihan sebagai berikut:

- 1) Kelautan dan perikanan;
- 2) Pariwisata;
- 3) Pertanian;
- 4) Kehutanan;
- 5) Energi dan sumber daya mineral;
- 6) Perdagangan;
- 7) Perindustrian; dan
- 8) Transmigrasi.

 Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah dalam mnyelenggarakan urusan pemerintah memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan

pemerintah daerah yang meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang jadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

2.3 Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran adalah skala atau nominal yang menunjukkan besar atau kecilnya suatu objek. Pegukuran variabel ini diukur dengan total aset dalam suatu periode waktu tertentu. Total aset dapat dilihat dari laporan keuangan bagian neraca. Total aset dalam LKPD terdiri atas aset lancar, investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, piutang pajak, piutang retribusi, piutang dana bagi hasil, deposito, aset tetap, dan dana cadangan. Total pendapatan suatu daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Perimbangan (DAU, DAK, BDH), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kusumawardani (2012) menjelaskan bahwa ukuran adalah suatu nominal yang dapat mendeskripsikan sesuatu. Ukuran organisasi menunjukkan besar kecilnya organisasi tersebut begitu pula ukuran pemerintah daerah juga menunjukkan seberapa besar pemerintah daerah tersebut. Sumarjo (2010) melakukan penelitian dengan variabel *size* (ukuran) pemerintah daerah yang diprosikan dengan total aset. Hasil dari penelitiannya menunjukkan secara empiris bahwa pegukuran daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. dari hasil penelitian tersebut, dapat di asumsikan bahwa total aset dapat mempengaruhi besar kecilnya ukuran pemerintah daerah tersebut. Yang artinya semakin besar total aset maka semakin besar pula ukuran pemerintah daerah. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil total aset maka semakin kecil pula ukuran pemerintah daerahnya. Hal ini akan berdampak pada kinerja keuangannya. Semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin besar pula tuntutan terhadap pemerintah dalam meningkatkan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Rumus yang digunakan sebagai berikut (Sumarjo,2010):

Size/ukuran pemerintah daerah = Total Aset

Berbagai cara untuk menilai organisasi juga dapat digunakan untuk menilai ukuran pemerintah daerah, salah satunya dengan total aset. Daerah yang memiliki ukuran daerah atau total aset yang lebih besar akan memiliki tuntutan dan kewajiban yang lebih besar pula dalam pelaporan pengungkapan wajib kepada publik.

Pemerintah daerah perlu mengungkapkan lebih lanjut tentang daftar aset yang dimiliki, pemeliharaan, dan pengelolaannya dalam laporan keuangan. Pemerintah daerah dengan ukuran besar sangat diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada publik. Harapan serta tuntutan terhadap pemerintah daerah akan mamcu kinerja pemerintah daerah yang lebih baik.

2.4 Opini Audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

(Angelina & Irsutami, 2012) menyebutkan bahwa opini audit merupakan bagian dari laporan audit yang merupakan informasi utama dari laporan audit. Opini audit merupakan pernyataan sebagai kesimpulan yang dikeluarkan oleh pemerriksa mengenai tingkat kewajaranyang disajikan dalam laporan keuangan menurut (Achmad, 2017). Dalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 menyebutkan opini. Ada lima jenis opini yang dibuatoleh BPK yaitu:

1. Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP), memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diberika dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN),Badanpemeriksaan keuangan (BPK) dapat memberikan opini.
2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Pragraf Penjelas (WTP-DPP) karena keadaan tertentu sehingga mengharuskan pemeriksamenambahkan suatu paragraf penjelesan dalam Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai modifikasi dari opini WTP.
3. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material

sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan.

4. Opini Tidak Wajar (TW), memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.
5. Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak memberikan Pendapat (TMP), menyatakan bahwa pemeriksaan tidak menyatakan opini atas laporan keuangan.

Dalam penelitian ini variabel opini audit didefinisikan dengan memberikan nilai skala 5 pada masing-masing jenis opini menurut (Achmad, 2017).

Dengan uraian dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Nilai Opini Audit

Opini Audit BPK atas LKPD	Nilai
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	5
Wajar Tanpa Pengecualian dengan Pragraf Penjelasan (WTP-DPP)	4
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	3
Tidak Wajar (TW)	2
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	1

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa opini audit merupakan bagian dari laporan audit yang merupakan informasi utama dari laporan audit. Opini audit diberikan oleh auditor melalui tahap beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan simpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya. Bahwa laporan audit adalah langkah proses terakhir dari seluruh proses audit.

Masing-masing opini diberikan sesuai dengan kriteria tertentu usng ditemukan selama proses audit. Pendapat auditor yang dituangkan dalam laporanaudit paling umum adalah laporan audit standar yang biasa juga disebut laporan standar untuk pendek.

2.5 Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah).

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah pusat sesuai dengan urusan pemerintah pusat yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumberdaya nasional yang berada di daerah dan perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber- sumber pembiayaan.

1. Sumber Pendapatan Daerah

Berdasarkan UU No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber pendapatan daerah ini terdiri dari beberapa hal, antara lain:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1) Hasil Pajak Daerah

Menurut PP No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

b. Dana Perimbangan

Menurut Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari:

1) Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil tersebut bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana yang bersumber dari pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak pribadi dalam negeri, dan PPh pasal 21. Sedangkan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas alam.

2) Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antara daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah.

3) Dana Alokasi khusus

Menurut Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana

Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dimaksudkan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kelompok ini dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup hibah dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok darurat dari pemerintah, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

2. Belanja Daerah

Menurut PP No.105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, belanja adalah suatu kesatuan pengguna anggaran SPRD dan sekretariat, srtta dinas daerah dan lembaga teknis daerah lainnya. Fungsi belanja ini antara lain untuk pendidikan, kesehatan, dan fungsi-fungsi lainnya. Belanja dapat dikelompokkan menjadi:

a. Belanja Rutin

Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah aset atau kekayaan bagi daerah. Belanja rutin terdiri dari belanja rutin, belanja barang, belanja perjalanan dinas, belanja lain-lain.

b. Belanja Modal atau pembangunan

Belanja modal atau pembangunan adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau

kekayaan daerah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional.

c. Pembiayaan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan ini bersumber dari:

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

2) Pencairan dan Cadangan

Pencarian dana cadangan berasal dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Digunakan untuk menggangarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah atau BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

4) Penerimaan pinjaman daerah

Digunakan untuk menggambarkan penerimaan pinjaman daerah daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman

Digunakan untuk menggambarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah lainnya.

6) Penerimaan piutang daerah

Digunakan untuk menggambarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain,

lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Besarnya biaya yang diperlukan harus diimbangi dengan sumber pendapatan/penerimaan sendiri. Ini menunjukkan bahwa organisasi harus mempunyai manajemen pengelolaan keuangan yang dapat memainkan peran dalam menggali sumber-sumber pendapatan atau mampu mengelola sumber pembiayaan dengan seefisien mungkin. Dengan demikian semua persoalan dapat diatasi secara ekonomis, efisien, efektif.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara langsung maupun tidak langsung. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

2.6 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Laporan keuangan merupakan laporan struktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo keuangan lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (PP RI No. 71 Tahun 2010).

Salah satu alat yang memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyaji Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komprehensif. Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, mulai tahun 2015 sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, komponen laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah daerah menjadi lebih banyak yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dimana dalam penyusunan laporan keuangan tersebut sudah berbasis akrual.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos- pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan tahun sebelumnya, lain-lain dan saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang menyajikan disandingkan dengan periode sebelumnya.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya

- a. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
- b. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

5. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan entitas dana pada tanggal tertentu. Pos- pos yang disajikan dalam neraca meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, dan

ekuitas dana.

6. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain, dan saldo anggaran lebih akhir (PP RI No 71 Tahun 2010). Untuk rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih akan diuraikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu (PP RI No.71 Tahun 2010). Entitas pelaporan harus mengklasifikasikan aset menjadi aset lancar dan non lancar dan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan (PP RI No. 71 Tahun 2010). Dalam laporan arus kas, arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- b. Beban dari operasional;
- c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional, bila ada;
- d. Pos luar biasa, bila ada;
- e. Surplus/defisit-LO.

Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam laporan operasional jika standar ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu entitas pelaporan (PP RI No. 71 Tahun 2010).

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: ekuitas awal; surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan ekuitas akhir (PP RI No. 71 Tahun 2010). Rincian lebih lanjut mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas akan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan dalam lingkup pemerintah diatur jelas berdasarkan aturan atau ketentuan hukum. Prinsip penyajian laporan keuangan pemerintahan sama dengan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan akuntansi, yang membedakan adalah komponen dan struktur laporannya.

Untuk menilai tingkat pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah dalam suatu tahun anggaran diperlukan analisis terhadap laporan keuangan

daerah. Analisis tersebut dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, apakah posisi keuangan pemerintah daerah mengalami peningkatan atau penurunan dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan beberapa metode analisis yang lazim digunakan untuk menganalisis terhadap laporan keuangan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Berikut disajikan ringkasan penelitian-penelitian terdahulu sejenis yang menjadi referensi untuk penelitian ini, agar mempermudah penulis untuk menyelesaikan penelitian ini:

Tabel 2.1

Penelitian terdahulu

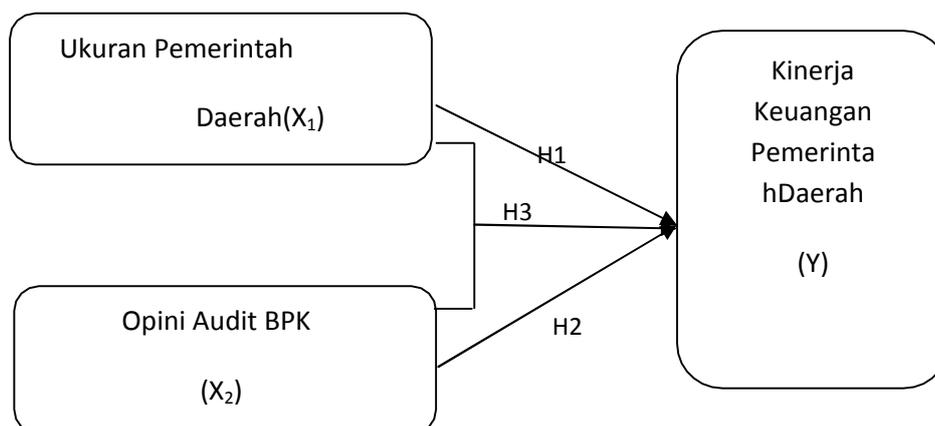
No	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Variabel	Hasil penelitian
1	Hendro Sumarjo (2010)	Pengaruh Karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah	Variabel independen: - ukuran, - kemakmuran, - ukuran legislatif, - <i>leverage</i> , - <i>intergovernmental</i>	Variabel ukuran, <i>leverage</i> , dan <i>intergovernmental revenue</i> sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan
		daerah	<i>revenue</i> Variabel dependen: Kinerja keuangan pemerintah daerah	pemerintah sedangkan variabel kemakmuran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
2	Havid Sularaso (2011)	Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota	Variabel Independen: - alokasi belanja modal, - pertumbuhan ekonomi Variabel dependen: kinerja keuangan pemerintah	Variabel kinerja keuangan, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah sedangkan aolkosi belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
3	Kusumawardi (2012)	Pengaruh <i>Size</i> , Kemakmuran, Ukuran Legislatif, <i>Leverage</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia	Variabel independen: <i>size</i> , kemakmuran ukuran legislatif - <i>leverage</i> , Variabel dependen: kinerja keunagan pemerintah daerah.	Variabel <i>size</i> , dan ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan variabel kemakmuran dan <i>leverage</i> idak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
4	Novita Angelina & Irsutam (2012)	Hubungan antara opini audit atas laporan keuangan daerah, pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) dengan kinerja keuangan pemerintah daerah	Variabel independen: - opini audit, - PAD, - DAU. Variabel dependen: kinerja keuangan pemerintah	Variabel PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan sedangkan variabel opini audit berpengaruh negatif terhadap

5	Gita Maiyora (2015)	Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota	Variabel independen: - <i>size</i> , - kemakmuran, - ukuran legislatif, - <i>leverage</i> , - <i>intergovernmental revenue</i> Variabel dependen: kinerja keuangan pemerintah daerah.	Variabel <i>size</i> dan <i>intergovernmental revenue</i> berpengaruh terhadap pemerintah daerah. Sedangkan variabel kemakmuran, ukuran legislatif, dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap pemerintah daerah.
6	Indah Puspa Sari (2016)	Pengaruh ukuran pemerintah daerah, <i>pad</i> , <i>leverage</i> , dan perimbangan dan ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah	Variabel independen: - ukuran pemerintah daerah, - <i>pad</i> , - <i>leverage</i> , - perimbangan, - ukuran legislatif Variabel dependen: kinerja keuangan pemerintah daerah.	Variabel ukuran pemerintah daerah, PAD, dan dana perimbangan berpengaruh terhadap pemerintah daerah. Sebagai variabel <i>leverage</i> dan ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
7	Abu Achmad (2017)	Pengaruh ukuran pemerintah daerah, <i>intergovernmental revenue</i> , dan hasil audit BPK terhadap pemerintah daerah	Variabel independen: - ukuran pemerintah daerah, - <i>intergovernmental revenue</i> , - temuan audit BPK, - Opini audit BPK. Variabel dependen: kinerja keuangan pemerintah daerah	Variabel pengukuran pemerintah, <i>intergovernmental revenue</i> , opini audit BPK berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan variabel temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap pemerintah daerah.
8	Rizky Hamdani Nst (2017)	Pengaruh ukuran pemerintah, kemakmuran pemerintah, ukuran legislatif, dana transfer pemerintah pusat dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah	Variabel independen: - ukuran, - kemakmuran, - ukuran legislatif, - dana transfer pemerintah pusat, - temuan audit BPK Variabel dependen: kinerja pemerintah daerah	Variabel ukuran, kemakmuran, ukuran legislatif, dana transfer pemerintah pusat tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Dan variabel temuan audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

2.8 Kerangka Berfikir

Adapun yang menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.9 Pengembangan Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian telah diuraikan pada bab I. Berikut ini merupakan pengembangan hipotesis yang dilakukan:

2.9.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Ukuran adalah skala atau nominal yang menunjukkan besar atau kecilnya suatu objek. Pengukuran variabel ini diukur dengan total aset dalam suatu periode waktu tertentu. Total aset dapat dilihat dari laporan keuangan bagian neraca. (Sumarjo, 2010) melakukan penelitian ukuran (*size*) pemerintah daerah yang diprosikan dengan total aset. Hasil dari penelitiannya menunjukkan secara empiris bahwa pengukuran daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. dari hasil penelitian tersebut, dapat di asumsikan bahwa total aset dapat mempengaruhi besar kecilnya ukuran pemerintah daerah tersebut. Menurut beberapa penelitian terdahulu mengenai ukuran pemerintah daerah yang dilakukan oleh (Achmad, 2017; Kusumawarda, 2012; Maiyora, 2015; Sari, 2016), menyebutkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pada penelitian ini

adalah:

H1: Ukuran Pemerintah Daerah Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.9.2 Pengaruh Opini Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Opini hasil pemeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilakukan oleh BPK menunjukkan tingkat kewajaran dan kesesuaian LKPD terhadap standar akuntansi yang berlaku. Opini audit BPK dapat menjadi tolak ukur untuk menilai akuntabilitas suatu pemerintah daerah. Opini ini dapat menaikkan atau pun menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas laporan atas pelaporan yang disajikan oleh pemerintah daerah.

Menurut beberapa penelitian terdahulu mengenai opini audit BPK yang dilakukan oleh (Achmad, 2017; Angelina & Irsutami, 2012). Hasil penelitian Achmad (2017) bahwa opini audit BPK berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Menurut Angelina & Irsutami (2012) bahwa kolerasi yang sangat lemah antara opini audit dengan kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur menggunakan konsep *value for money* (Nilai uang) disebabkan karena audit BPK terhadap laporan keuangan daerah lebih ditekankan pada kewajaran dan ketaatan pada Sistem Pengendalian Internal, dan bukan pada nilai nominal laporan keuangannya.

H2: Opini Audit BPK Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.9.3 Pengaruh ukuran pemerintah daerah dan opini audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Ukuran adalah skala atau nominal yang menunjukkan besar atau kecilnya suatu objek. Pengukuran variabel ini diukur dengan total aset dalam suatu periode waktu tertentu. Total aset dapat dilihat dari laporan keuangan bagian neraca. (Sumarjo, 2010) melakukan penelitian *size* (ukuran) pemerintah daerah yang diprosikan dengan total aset. Hasil dari penelitiannya menunjukkan secara empiris bahwa pengukuran daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. dari hasil penelitian tersebut, dapat di asumsikan bahwa total aset dapat mempengaruhi besar kecilnya ukuran pemerintah daerah tersebut.

Menurut beberapa penelitian terdahulu mengenai opini audit BPK yang dilakukan oleh (Achmad, 2017; Angelina & Irsutami, 2012). Hasil penilitian Achmad (2017) bahwa opini audit BPK berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Menurut Angelina & Irsutami (2012) bahwa kolerasi yang sangat lemah antara opini audit degan kinerja keuangan pemerintah daerah yang dikur menggunakan konsep *value for money* disebabkan karena audit BPK terhadap laporan keuangan daerah lebih ditekankan pada kewajaran dan ketaatan pada Sistem Pengendalian Internal, dan bukan pada nilai nominal laporan keuangannya.

H3: Ukuran pemerintah daerah dan opini audit BPK secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, ditinjau dari tingkat eksplanasi penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan bentuk hubungan kausal. Menurut Sugiyono (2012; 56) hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan sumber data sekunder. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan, sedangkan data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dengan media perantara. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tahun 2016-2017. Data variabel independen yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota di Sumatera Barat dapat dilihat dari ketersediaan informasi keuangan yang lengkap yang dapat pada *website* resmi pemerintah daerah masing-masing, dimana LKPD tersebut telah terdapat opini audit BPK yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksa Tahun 2016-2017 oleh BPK RI, melalui situs <http://www.bpk.go.id>.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2012) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. populasi dalam penelitian ini adalah daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 19 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat.

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2012;81) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *total sampling*. *Total Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Alasan utama peneliti menggunakan seluruh populasi dengan Total sampling dengan ketentuan Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota yang laporan keuangan pemerintah daerahnya telah diaudit oleh BPK yang memiliki data lengkap pada laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2016-2017.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumentasi yang dilakukan dengan mngumpulkan data sekunder, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini dalam pemerintah daerah kabupaten dan kota pada tahun 2016-2017 yang diambil dari Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) di Provinsi SumateraBarat.

3.5 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

Variabel penelitian adalah karakteristik yang melekat pada orang, benda, atau subjek lainnya yang jika diukur karakteristik tersebut nilainya dapat bervariasi atau dapat berbeda antar subjek satu dengan yang lainnya, Nuryaman & Cristina (2015;41).

Defenisi oprerasional variabel adalah menggambarkan atau mendeskripsikan variabel penelitian sedemikian rupa, sehingga variabel tersebut bersifat spesifik dan terukur, variabel penelitian dapat dibagi menjadi dua macam, Nuryaman & Cristina (2015;42).

1. Variabel Independen (X)

Variabel indenpenden atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel indenpenden dalam penelitian ini adalah Ukuran Pemerintah Daerah dan Opini Audit Badan Pemeriksaan Keuangan.

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependen adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Tabel 3.1
Defenisi Operasional dan Satuan Variabel

No	Variabel	Defenisi	Pengukuran	Satuan
1	Ukuran Pemerintah Daerah (X ₁)	Ukuran adalah skala atau nominal yang menunjukkan besar atau kecilny suatu objek. Pengukura variabel ini diukur dengan total aset. (Sumarjo, 2010)	Ukuran Pemerintah Daerah = Total Aset (Sumarjo, 2010)	Jutaan Rupiah
2	Opini audit BPK (X ₂)	Opini audit merupakan pernyataan sebagai kesimpulan yang dikeluarkan oleh pemeriksa mengenai tingkat kewajarannya yang disajikan dalam laporan keuangan. (Achmad, 2017)	Opini audit BPK diberi nilai antara 1 sampai dengan 5 (Achmad, 2017)	Nilai Opini: 5=WTP 4=WTP-DPP 3=WDP 2=TW 1=TMP

	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. (UU No. 32 tahun 2004)	Rasio Kemandirian = $\frac{PAD}{\text{Subsidi Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Pinjaman (Halim, 2012)}}$	Persen (%)
--	--	--	---	------------

3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi berganda (*multiple regressions*). Metode regresi berganda adalah metode analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat Imam Ghozali (2011;6). Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak (*software*) statistik SPSS (*statistical package for social sciences*) versi 20.

3.6.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menghasilkan gambaran dari data yang telah terkumpul. Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata (mean), maksimum, minimum, dan standar deviasi.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Penggunaan uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan pada penelitian ini. Tujuan lainnya untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang digunakan mempunyai data yang terdistribusikan secara normal, bebas dari autokorelasi, multikolinieritas serta heterokedistisitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel bebas, dan variabel terikat memiliki distribusi normal dan tidak. Dalam uji normalitas ini ada 2 cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik Ghozali (2011;160). Alat uji yang digunakan adalah dengan analisis grafik histogram dan grafik normal probability plot dan uji statistik dengan

Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S).

Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik normal probability plot adalah Ghozali (2011;160):

- a. Jika titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika titik menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling korelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel sama dengan nol Ghozali (2011;105). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model, peneliti akan melihat *Tolerance* dan *Variance Inflation Factors* (VIF) dengan alat bantu aplikasi komputer.

Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan variabel *cut-off* independen lainnya. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai $Tolerance \geq 0,10$ atau sama dengan $VIF \leq 10$. Bila ternyata dalam model terdapat multikolonieritas, peneliti akan mengatasi hal tersebut dengan transformasi variabel. Transformasi variabel merupakan salah satu cara mengurangi hubungan linier diantara variabel independen. Transformasi dapat dilakukan dalam bentuk logaritma natural dan bentuk first difference atau delta Ghozali (2011;104).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji *Heteroskedastisitas* bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang tetap, maka disebut *homoskedastisitas* dan jika berbeda disebut *heteroskedastisitas*.

MenurutGhozali (2011; 139) model regresi yang baik adalah *homoskedastisitas* atau tidak terjadi *heteroskedastisitas*.

Dasar analisis untuk menentukan ada atau tidaknya *heteroskedastisitas* dengan *scatterplot* yaitu :

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik membentuk suatu pola tertentu, yang teratur seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Selain itu, dengan menggunakan program SPSS, heteroskedastisitas juga bisa dilihat dengan melihat grafik *scatterplot* dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya). Jika ada pola seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur, maka telah terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas menurut Ghozali (2011; 139)

4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan untuk menghindari adanya autokorelasi pada suatu penelitian Ghozali (2011;110). Adanya autokorelasi akan mengakibatkan penaksiran dengan kuadrat terkecil akan sangat sensitif terhadap fluktuasi sampel dan penaksir-penaksirannya tidak efisien lagi. Jika terjadi autokorelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk mengetahui apakah terjadi autokorelasi dalam suatu model regresi maka dalam penelitian ini digunakan *Durbin Watson Test (DW-Test)*. Kriteria untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:

- a. Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah -2 ($DW < -2$)
- b. Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 ($-2 \leq DW \leq +2$)

c. Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW diatas +2 ($DW > +2$)

3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier (analisis linier berganda) digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dalam mempengaruhi variabel tidak bebas secara bersama-sama ataupun secara parsial. Persamaan regresi dengan linier berganda dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah X_1 = Ukuran Pemerintah Daerah

X_2 = Opini Audit BPK

α = Konstan

e = error

β_1, β_2 = Koefisien Regresi

3.6.4 Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011;151) Data yang beskala interval dan rasio pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan cara sebagai berikut : Uji signifikan atau pengaruh nyata variabel independen (X_i) terhadap variabel dependen (Y) yang dilakukan dengan cara uji parsial atau uji T (t-test) dan uji F (f-test) signifikan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

1. Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya untuk mengetahui apakah semua variabel bebas Ukuran Pemerintah Daerah (X_1), dan Opini Audit BPK (X_2), yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel terikat Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Dengan kaidah sebagai berikut :

- a. Jika $|F_{hitung}| > F_{tabel}$ dan nilai signifikannya $< 0,05$ artinya ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara X_1 , X_2 secara simultan terhadap Y.
- b. Jika nilai $|F_{hitung}| < F_{tabel}$ dan nilai signifikannya $> 0,05$ artinya tidak ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antar X_1 , X_2 secara simultan terhadap Y.

3.6.5 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara dua variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi yang biasanya diberi simbol R^2 menunjukkan hubungan pengaruh antara dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen dari hasil perhitungan tertentu. Dalam kata lain R^2 digunakan untuk mengukur derajat hubungan antara tiap variabel X terhadap variabel Y secara parsial. Apabila teknik analisa datanya terdiri dari satu sampai dua variabel bebas, kita menggunakan *R square*, tetapi apabila jumlah variabel bebasnya lebih dari dua maka lebih baik menggunakan *Adjusted R square*, Ghazali (2011;97).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Umum Provinsi Sumatera Barat

Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak dipulau Sumatera dengan Padang sebagai ibu kotanya. Sesuai dengan namanya, wilayah provinsi ini menempati sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Dari utara ke selatan, provinsi dengan wilayah seluas 42.297,30 km² ini berbatasan dengan empat provinsi, yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu.

Sumatera Barat berpenduduk sebanyak 4.846.909 jiwa dengan mayoritas beretnis Minang kabau yang seluruhnya beragama Islam. Nama Provinsi Sumatera Barat bermula pada zaman *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC), di mana sebutan wilayah untuk kawasan pesisir barat Sumatera adalah *Hoofdcantoor van Sumatra's westkust*. Kemudian dengan semakin menguatnya

pengaruh politik dan ekonomi VOC, sampai abad ke-18 wilayah administratif ini telah mencakup kawasan pantai barat Sumatera mulai dari Barus sampai Inderapura.

Pada awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, wilayah Sumatera Barat tergabung dalam provinsi Sumatera yang berpusat di Bukittinggi. Empat tahun kemudian, Provinsi Sumatera dipecah menjadi tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Sumatera Barat beserta Riau dan Jambi merupakan bagian dari keresidenan di dalam Provinsi Sumatera Tengah. Pada masa PRRI, berdasarkan Undang-undang darurat nomor 19 tahun 1957, Provinsi Sumatera Tengah dipecah lagi menjadi tiga provinsi yakni Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi. Wilayah Kerinci yang sebelumnya tergabung dalam Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci, digabungkan ke dalam Provinsi Jambi sebagai kabupaten tersendiri. Begitupun wilayah Kampar, Rokan Hulu, dan Kuantan Singingi ditetapkan masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau. Selanjutnya ibu kota provinsi Sumatera Barat yang baru ini masih tetap di Bukittinggi. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 1/g/PD/1958, tanggal 29 Mei 1958 ibu kota provinsi dipindahkan ke Padang.

4.2 Geografis Sumatra Barat

Sumatra barat terletak dipesisir barat bagian tengah pulau Sumatera yang terdiri dari dataran rendah di pantai barat dan dataran tinggi vulkanik yang dibentuk oleh bukit barisan. Provinsi ini memiliki daratan seluas 42.297,30 km² yang setara dengan 2,17% luas Indonesia. Dari luas tersebut, lebih dari 45,17% merupakan kawasan yang masih ditutupi hutan lindung. Garis pantai provinsi ini seluruhnya bersentu dengan Samudra Hindia sepanjang 2.420.357 km dengan luas perairan laut 186.580 km². Kepulauan Mentawai yang terletak di Samudra Hindia termasuk dalam provinsi ini.

Seperti daerah lainnya di Indonesia, iklim Sumatera Barat secara umum bersifat tropis dengan suhu udara yang cukup tinggi, yaitu antara 22,6 °C sampai 31,5°C. Provinsi ini juga dilalui oleh garis khatulistiwa, tepatnya di Bonjol, Pasaman. Di provinsi ini berhulu sejumlah sungai besar yang

bermuara ke pantai timur sumatera seperti Batang Hari, Siak, Indragiri (disebut sebagai Batang Kuantan di bagian hulunya), dan kampar, sementarasungai-sungai yang bermuara ke pesisir barat adalah Batang Anai, Batang Arau, dan Batang Tarusan.

Terdapat 29 gunung yang tersebar di 7 kabupaten dan kota disumatera barat, dengan Gunung Kerinci di kabupaten solok selatan sebagai gunung tertinggi, yang mencapai ketinggian 3.085m. Selain Gunung kerinci, Sumatera Barat juga memiliki gunung aktif lainnya, seperti Gunung Merapi, Gunung Tandikat, dan Gunung Talang. Selain gunung, Sumatera Barat juga memiliki banyak danau. Danau terluas adalah Singkarak dikabupaten solok dan kabupaten Tanah Datar, disusul Maninjau di kabupaten Agam. Dengan luas mencapai 130,1 km², Singkarak juga menjadi danau terluas kedua di Sumatera dan kesebelas di Indonesia. Danau lainnya terdapat di kabupaten solok yaitu danau Talang dan Danau kembar (juluk dari danau diatas dan danau dibawah).

Tabel 4.1

Arah dan Batas Wilayah Sumatera Barat

Arah	Batas Wilayah
Utara	Provinsi Sumatera Utara
Selatan	Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu
Barat	Samudera Hindia
Timur	Provinsi Riau

Sumber :Badan Pusat Statistik, 2016

4.3 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah di 19 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2016-2017 yang diperoleh dari kantor BPK RI

Perwakilan Propinsi Sumatera Barat yang berada di Kota Padang dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran selama dua tahun yaitu 2016 dan 2017 di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Laporan Realisasi Anggaran ini yang akan dijadikan sampel dalam penelitian yang terlihat dalam tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2
Ukuran Pemerintah Daerah di Kabupaten dan Kotadi
Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Total Aset	
		2016 (Rp)	2017 (Rp)
1	Kab. Agam	1.914.637.755.556	1.895.241.067.342
2	Kab. Dhamasraya	2.119.569.745.404	2.239.704.586.406
3	Kab. Kep Mentawai	1.668.883.691.928	1.412.704.597.903
4	Kab. Lima Puluh Kota	1.249.813.476.175	1.362.337.170.668
5	Kab. PadangPariaman	1.298.842.171.022	1.293.847.951.538
6	Kab. Pasaman Barat	2.146.604.020.542	1.875.011.786.828
7	Kab. Pasaman	132.324.210.630	116.771.255.682
8	Kab. Pesisir Selatan	2.081.442.252.462	1.997.168.847.561
9	Kab. Sijunjung	1.530.929.712.427	1.604.974.577.372
10	Kab. Solok Selatan	1.677.234.003.881	1.716.684.335.160
11	Kab. Solok	1.576.779.654.243	1.535.448.946.175
12	Kab.Tanah Datar	1.226.234.064.490	1.221.308.168.072
13	Kota Bukit Tinggi	1.492.027.311.190	197.276.768.550
14	Kota Padang Panjang	1.035.574.746.534	1.229.689.322.425
15	Kota Padang	6.881.114.488.677	7.124.735.437.140
16	Kota Pariaman	880.690.952.872	821.666.520.449
17	Kota Payakumbuh	1.054.710.869.365	1.130.891.630.860
18	Kota Sawahlunto	645.974.565.708	820.786.038.048
19	Kota Solok	1.373.002.012.240	1.406.995.150.842

Sumber: BPK RI Perwakilan Sumatera Barat

Ukuran pemerintah daerah diukur dengan total aset yang dimiliki pemerintah tersebut, berdasarkan nilai pada tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa nilai ukuran pemerintah daerah tertinggi pada tahun 2017 dimiliki oleh kota padang sebesar Rp 7.124.735.437.140, ukuran pemerintah daerah terendah dimiliki oleh pemerintah di Kabupaten Pasaman pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 116.771.255.682. Analisis dari

tabel 4.2 bahwa pemerintah daerah di Kota Padang dengan total aset yang besar akan mampu menjalankan kegiatan operasional pemerintah dengan baik maka semakin tinggi kinerja keuangan pemerintah tersebut. Tetapi pada pemerintah daerah Kabupaten Pasaman belum bisa di lihat kinerja keuangan pemerintah daerah karena masih kecilnya total aset yang dimiliki oleh daerah tersebut. Hal ini berarti semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin tinggi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Opini audit BPK di nilai dengan 1 sampai dengan 5 , berdasarkan nilai pada tabel 4.3 dibawah dapat dilihat bahwa Opini audit BPK tertinggi sebesar 5 dimiliki oleh pemerintah daerah di Kota Solok pada tahun 2017, sementara opini audit BPK terendah dimiliki oleh kabupaten kepulauanmentawai pada tahun 2016 yaitu sebesar 3.

Tabel 4.3

Opini Audit BPK Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat

NO	NAMA	2016		2017	
		Opini	Nilai Opini	Opini	Nilai Opini
1	Kab. Agam	WTP	5	WTP	5
2	Kab. Dharmasraya	WTP	5	WTP	5
3	Kab. kepulauan mentawai	WDP	3	WTP	5
4	Kab. lima puluh kota	WTP	5	WTP	5
5	Kab. padang pariaman	WTP	5	WTP	5
6	Kab. pasaman barat	WTP	5	WTP	5
7	Kab. Pasaman	WTP	5	WTP	5
8	Kab. Sijunjung	WTP	5	WTP	5
9	Kab. solok selatan	WTP	5	WTP	5
10	Kab. Solok	WDP	3	WTP	5
11	Kab. tanah datar	WTP	5	WTP	5
12	Kab. pesisir selatan	WTP	5	WTP	5
13	Kota bukittinggi	WTP	5	WTP	5
14	Kota padang panjang	WTP	5	WTP	5
15	Kota padang	WTP	5	WTP	5
16	Kota pariaman	WTP	5	WTP	5
17	Kota payakumbuh	WTP	5	WTP	5
18	Kota sawahlunto	WTP	5	WTP	5
19	Kota solok	WTP	5	WTP	5

Sumber: BPK RI Perwakilan Sumatera Barat

Analisis dari tabel 4.3 tersebut menyatakan bahwa opini audit BPK pada tahun 2017 di Kota Solok, tingginya jumlah opini audit yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu mengelola keuangan daerahnya dengan baik dan telah terhindar dari penyimpangan standar akuntansi dan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pada tahun 2016 di kabupaten kepulauan mentawai sudah mulai mengelola keuangan daerah nya dengan baik.

Kinerja keuangan pemerintah daerah di ukur dengan pendapatan asli daerah di bandingkan dengan dana transfer yang dimiliki pemerintah daerah tersebut, berdasarkan hasil pada tabel 4.4 dibawah dapat dilihat bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tertinggi dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Padang sebesar 0,25 atau 25% dan kinerja keuangan pemerintah daerah dimiliki oleh Kota Pariaman terendah sebesar 0,05 atau 5%. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan aturan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Tabel 4.4

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio
1	Kab. Agam	102.597.441.502	1.223.953.749.833	0,08
2	Kab. Dhamasraya	56.453.463.178	815.757.204.581	0,07
3	Kab. Kep Mentawai	41.948.183.104	848.088.594.450	0,05
4	Kab. Lima Puluh Kota	70.532.494.833	1.109.919.364.081	0,06
5	Kab. PadangPariaman	72.859.394.000	1.182.861.952.300	0,06
6	Kab. Pasaman Barat	91.174.717.113	977.848.983.075	0,09
7	Kab. Pasaman	88.862.264.200	877.511.476.587	0,10
8	Kab. Pesisir Selatan	76.833.967.628	801.074.828.035	0,10
9	Kab. Sijunjung	51.138.125.857	724.594.959.126	0,07
10	Kab. Solok Selatan	58.803.477.232	1.066.765.102.592	0,06
11	Kab. Solok	118.971.143.693	1.062.269.282.015	0,11
12	Kab.Tanah Datar	108.915.294.627	1.330.025.562.805	0,08
13	Kota Bukit Tinggi	71.303.781.735	575.741.940.120	0,12
14	Kota Padang Panjang	70.357.124.066	479.579.235.757	0,15
15	Kota Padang	391.925.662.646	1.538.594.662.970	0,25

16	Kota Pariaman	29.680.784.157	591.854.393.894	0,05
17	Kota Payakumbuh	87.445.115.902	626.587.520.593	0,14
18	Kota Sawahlunto	53.388.553.982	509.630.596.269	0,10
19	Kota Solok	42.117.207.737	529.889.403.310	0,08

Sumber: BPK RI Perwakilan Sumatera Barat

Analisis dari tabel 4.4 yang menyatakan bahwa tingkat pencapaian untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan aturan perundang-undangan selama satu periode anggaran yang ditentukan oleh pemerintah itu sendiri dimiliki oleh pemerintah Kota Padang dan untuk daerah yang belum bisa mencapai untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan aturan perundang-undangan selama satu periode anggaran yang ditentukan oleh daerah itu sendiri dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Pariaman.

Tabel 4.5

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

No	Pemerintah Daerah	PAD (Rp)	Pendapatan transfer (Rp)	Rasio
1	Kab. Agam	161.539.091.438	1.209.798.686.682	0,13
2	Kab. Dharmasraya	98.937.393.387	832.001.957.512	0,12
3	Kab. Kep. Mentawai	67.862.676.598	849.931.172.701	0,08
4	Kab. Lima puluh kota	119.771.917.448	1.154.770.087.419	0,10
5	Kab. Padang pariaman	141.310.805.691	1.388.638.247.011	0,10
6	Kab. pasaman barat	158.920.863.863	909.758.284.139	0,17
7	Kab. Pasaman	142.748.233.335	849.714.744.203	0,17
8	Kab. Sijunjung	107.915.719.073	846.848.906.496	0,13
9	Kab. solok selatan	75.505.887.736	717.774.678.203	0,11
10	Kab. Solok	113.269.815.423	1.021.162.705.982	0,11
11	Kab. tanah datar	172.812.022.623	1.047.455.556.300	0,16
12	Kab. pesisir selatan	178.145.381.104	1.326.689.259.630	0,13
13	Kota bukittinggi	102.375.931.332	550.998.955.857	0,19
14	Kota padang panjang	88.837.033.624	502.225.856.055	0,18
15	Kota padang	548.653.179.266	1.524.189.578.021	0,36
16	Kota pariaman	3.088.184.612	551.363.249.132	0,01
17	Kota payakumbuh	116.596.479.804	621.597.821.589	0,19
18	Kota sawahlunto	62.459.787.921	490.823.048.329	0,13
19	Kota solok	41.852.774.058	542.153.975.616	0,08

Sumber: BPK RI Perwakilan Sumatera Barat

Kinerja keuangan pemerintah daerah di ukur dengan pendapatan asli daerah di bandingkan dengan dana transfer yang dimiliki pemerintah daerah tersebut, berdasarkan hasil pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tertinggi dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Padang sebesar 0,36 atau 36% dan kinerja keuangan pemerintah daerah dimiliki oleh Kota Pariaman terendah sebesar 0,01 atau 1%. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan aturan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Analisis dari tabel 4.5 yang menyatakan bahwa tingkat pencapaian untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan aturan perundang-undangan selama satu periode anggaran yang ditentukan oleh pemerintah itu sendiri dimiliki oleh pemerintah Kota Padang dan untuk daerah yang belum bisa mencapai untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan aturan perundang-undangan selama satu periode anggaran yang ditentukan oleh daerah itu sendiri dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Pariaman

Tabel 4.6
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran_Pemerintah_Daerah	38	116771,00	7124735,00	1657621,9737	1382000,96321
Opini_Audit_BPK	38	3,00	5,00	4,8947	,45259
Kinerja_Keuangan_Pemerintah_Daerah	38	,01	,36	,1176	,06258
Valid N (listwise)	38				

Sumber : Output SPSS 19 (2019)

Tabel 4.6 diatas menggambarkan statistik deskriptif seluruh variabel penelitian yang meliputi nilai minimum, maximum, mean, dan standar deviasi. Jumlah data pengamatan (N) dalam penelitian ini ada 38 data selama tahun 2016-2017. Penelitian ini menggunakan total aset dalam mengukur ukuran pemerintah daerah. Dilihat dari ukuran pemerintah daerah. Pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat memiliki total aset rata-rata 1,657 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 1,382. Nilai rata-rata sebesar 1,657 menandakan bahwa rata-rata pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat tergolong memiliki kinerja yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi. Total aset tertinggi sebesar 7,124 (dalam trilyun rupiah) dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Padang pada tahun 2017, sementara total aset terendah dimiliki oleh Kabupaten Pasaman pada tahun 2017 yaitu sebesar 1,1677 (dalam milyaran rupiah).

Jumlah opini audit BPK memiliki rata-rata 4,8947, sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,45259. Nilai rata-rata sebesar 4,8947 menandakan bahwa rata-rata pemerintah lebih besar dari standar deviasi. Opini audit BPK tertinggi sebesar 5,00 dimiliki oleh pemerintah daerah di Kota Solok pada tahun 2017, sementara opini audit BPK terendah dimiliki oleh kabupaten kepulauan mentawai pada tahun 2016 yaitu sebesar 3,00.

Kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki rata-rata 0,1176 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,06258. Nilai rata-rata sebesar 0,1176 menandakan bahwa rata-rata pemerintah lebih besar dari standar deviasi. Kinerja keuangan pemerintah daerah tertinggi sebesar 0,36 dimiliki oleh pemerintah daerah di Kota Padang pada tahun 2017, sedangkan kinerja keuangan pemerintah daerah terendah sebesar 0,01 dimiliki oleh pemerintah daerah di Kota pariaman.

4.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini mencakup uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolinearitas dan uji autokorelasi. Berikut hasil uji asumsi klasik tersebut:

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk mengetahui data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berdistribusi normal. Dari hasil analisis dengan program SPSS versi 19 dengan *Kolmogorov-Smirnov* (KS) sebagai berikut:

Tabel 4.7

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		38
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,04750287
Most Extreme Differences	Absolute	,128
	Positive	,128
	Negative	-,081
Test Statistic		,128
Asymp. Sig. (2-tailed)		,117 ^e

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data diolah dengan SPSS Versi 19.0(2019)

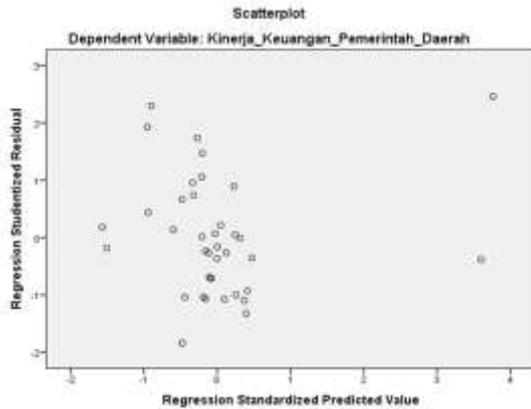
Berdasarkan tabel 4.7 diatas, jika angka signifikansi *Kolmogorov Smirnov* $> 0,05$ maka menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, sebaliknya jika angka signifikansi *Kolmogorov Smirnov* $< 0,05$ maka menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Dari tabel 4.7 di atas menunjukan tingkat signifikansi *Kolmogorov Smirnov* sebesar $0,117 > 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal dan dapat diteliti lebih lanjut.

4.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan varian residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar *Scatterplot* yang menguji nilai prediksi variabel (ZPRED) dengan nilai residualnya (SRESID). Dari hasil analisis data dengan menggunakan program SPSS 19 for windows telah dihasilkan gambar *Scatterplot* sebagai berikut:

Gambar 4.1

Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Output SPSS 19 (2019)

Hasil uji heteroskedastisitas pada gambar 4.1 bahwa pada grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya diperoleh hasil tidak adanya pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi Heteroskedastisitas pada model regresi dan layak digunakan dalam meneliti.

Dalam model regresi suatu data bisa dikatakan terbebas dari autokorelasi jika nilai *Durbin Watson test* (*dw*) berada diantara -2 dan 2. Nilai *Durbin Watson test* (*dw*) pada tabel 4.10 diatas diperoleh sebesar 1,683 dari nilai variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Angka 1,683 tersebut berada diantara -2 dan 2 atau angka tersebut kecil dari 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) tidak terjadi autokorelasi atau tidak berhubungan dengan nilai variabel itu sendiri, sehingga penelitian ini dapat diteliti lebih lanjut.

4.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen yaitu ukuran pemerintah daerah (X1), dan opini audit BPK (X2), terhadap variabel dependen kinerja keuangan pemerintah daerah (Y).

Dengan menggunakan bantuan program SPSS 19 *for windows*, hasil data yang telah diolah menunjukkan ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil pengolahan data tersebut, didapat hasil analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

Tabel 4.10

Uji Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	-,087	,088	
Ukuran_Pemerintah_Dae rah	2,742E-8	,000	,605
Opini_Audit_BPK	,033	,018	,235

a. Dependent Variable: Kinerja_Keuangan_Pemerintah_Daerah
Sumber: Output SPSS 22 (2019)

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, diperoleh model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -,087 + 2,742 X_1 + 0,033 X_2 + e$$

Berdasarkan model persamaan regresi linier berganda diatas, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar -0,087 mengindikasikan bahwa, jika variabel independen yaitu Ukuran pemerintah daerah (X_1), dan Opini audit BPK (X_2), bernilai nol maka nilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) akan mengalami penurunan sebesar konstantanya yaitu sebesar 0,087 atau 8,7%.
2. Nilai koefisien ukuran pemerintah daerah (X_1) bernilai positif sebesar 2,742. Hal ini menunjukkan bahwa, jika nilai ukuran pemerintah daerah (X_1) mengalami peningkatan sebesar 1 juta dengan asumsi opini audit BPK (X_2) bernilai tetap atau nol, maka kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) akan naik sebesar 2,742 atau 274,2%.
3. Nilai koefisien opini audit BPK (X_2) bernilai positif sebesar 0,033. Hal ini menunjukkan bahwa, jika nilai opini audit BPK (X_2) mengalami peningkatan sebesar 1 nilai audit dengan asumsi ukuran pemerintah daerah (X_1) bernilai tetap atau nol, maka kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) akan naik sebesar 0,033 atau 3,3%.

4.6 Uji Hipotesis

4.6.1 Uji Signifikansi Individual (Uji t)

**Tabel 4.11 Hasil Uji t (t-test)
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,087	,088		-,994	,327
Ukuran_Pemerintah_Daerah	2,742E-14	,000	,605	4,719	,000
Opini_Audit_BPK	,033	,018	,235	1,835	,075

a. Dependent Variable: Kinerja_Keuangan_Pemerintah_Daerah

Sumber: Output SPSS 19 (2019)

Uji t akan memberikan gambaran seberapa signifikan variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak digunakan kriteria pengujian sebagai berikut:

- Jika $|t \text{ hitung}| > t \text{ tabel} < 0,05$ maka variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika $|t \text{ hitung}| < t \text{ tabel} > 0,05$ maka variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat dilakukan analisis data untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual sebagai berikut:

4.6.1.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah (X1) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Pengujian hipotesis pertama (H1) pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel uji regresi linier berganda yang menunjukkan nilai t dan nilai signifikansi masing-masing variabel independen. Dari hasil analisis data pada tabel di atas di peroleh nilai t hitung sebesar $4,719 > t \text{ tabel } 1,690$ dan signifikansi $0,000 < \text{dari taraf signifikansi } 0,05$. Artinya nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diterima.

4.6.1.2 Pengaruh Opini Audit BPK Daerah (X2) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Pengujian hipotesis kedua (H2) pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel uji regresi linier berganda yang menunjukkan nilai t dan nilai signifikansi masing-masing variabel independen. Dari hasil analisis data pada tabel di atas diperoleh nilai t hitung sebesar $1,835 > t \text{ tabel } 1,690$ dan signifikansi $0,075 < \text{dari taraf signifikansi } 0,05$. Artinya nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa opini audit BPK tidak berpengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa opini audit BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah tidak dapat diterima atau ditolak.

4.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau uji bersama-sama. Untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak digunakan kriteria pengujian sebagai berikut:

- Jika $|F \text{ hitung}| > F \text{ tabel} < 0,05$ maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.
- Jika $|F \text{ hitung}| < F \text{ tabel} > 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.

Dari hasil analisis data dengan menggunakan program SPSS 19 *for windows* telah dihasilkan tabel uji F sebagai berikut:

Tabel 4.12 Hasil Uji FANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,061	2	,031	12,869	,000 ^b
Residual	,083	35	,002		
Total	,145	37			

a. Dependent Variable: Kinerja_Keuangan_Pemerintah_Daerah

b. Predictors: (Constant), Opini_Audit_BPK, Ukuran_Pemerintah_Daerah

Sumber: Output SPSS 22 (2019)

Tabel diatas merupakan tabel hasil uji pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Untuk pengujian hipotesis ke tiga (H3) pada penelitian ini dapat dilihat pada nilai F dan nilai signifikansi variabel. Dari hasil analisis data pada tabel diatas diperoleh nilai F hitung sebesar 12,869 > dari F tabel 3,27 dan signifikansi 0,000 < dari taraf signifikansi 0,05. Artinya nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah dan opini audit BPK secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran pemerintah daerah dan opini audit BPK berpengaruh simultan terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat.

4.7 Uji Koefisien Determinasi(R²)

Dalam penelitian ini R² yang digunakan adalah *Adjusted R²* karena penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel independen dan nilai *Adjusted R²* dapat naik atau turun berdasarkan signifikansi variabel independen. Dari hasil olah data dengan menggunakan program SPSS 19for windows telah dihasilkan tabel hasil uji koefisien Determinasi (R²) sebagai berikut:

Tabel 4.13
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,651 ^a	,424	,391	,04884

a. Predictors: (Constant), Opini_Audit_BPK, Ukuran_Pemerintah_Daerah

b. Dependent Variable: Kinerja_Keuangan_Pemerintah_Daerah

Tabel diatas merupakan hasil pengolahan data untuk melihat hasil uji koefisien determinasi (R²) dalam penelitian ini. Diketahui bahwa nilai *R Square* diperoleh sebesar 0,424 atau 42,4%. Hal ini berarti bahwa variabel independen yaitu Ukuran pemerintah daerah dan Opini Audit BPK menjelaskan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 42,4%, Sedangkan sisanya 57,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasuki di dalam penelitian ini.

4.8 Pembahasan

4.8.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat

Hipotesis pertama menyatakan bahwa terdapat pengaruh ukuran pemerintah daerah yang signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pemerintah di kabupaten dan kota provinsi Sumatera Barat. Hasil dalam pengujian secara parsial dengan menggunakan Uji t menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, karena nilai $|t \text{ hitung}|$ sebesar $4,719 > t \text{ tabel } 1,690$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. maka hipotesis pertama diterima. Jadi, ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat.

Kusumawardani (2012) menjelaskan bahwa ukuran adalah suatu nominal yang dapat mendeskripsikan sesuatu. Ukuran organisasi menunjukkan besar kecilnya organisasi tersebut begitu pula ukuran pemerintah daerah juga menunjukkan seberapa besar pemerintah daerah tersebut. Ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset. Hasil dari penelitiannya menunjukkan secara empiris bahwa pengukuran daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. dari hasil penelitian tersebut, dapat di asumsikan bahwa total aset dapat mempengaruhi besar kecilnya ukuran pemerintah daerah tersebut.

Analisis dari hasil ukuran pemerintah dengan menggunakan total aset dapat membantu kegiatan operasional pemerintah daerah yang diiringi dengan meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin besar ukuran daerah maka kinerja keuangan akan semakin baik, karena pemerintah dapat membiayai sendiri semua kegiatan pemerintahannya dengan tidak bergantung pada transfer pemerintah pusat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu mengenai ukuran pemerintah daerah yang dilakukan oleh (Achmad, 2017; Kusumawardani, 2012; Maiyora, 2015; Sari, 2016), menyebutkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah mempunyai pengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. ukuran (*size*) pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset, yang menyatakan pengukuran daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

4.8.2 Pengaruh Opini Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat

Hipotesis kedua menyatakan bahwa terdapat pengaruh opini audit BPK yang signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pemerintah di kabupaten dan kota provinsi Sumatera Barat . Hasil dalam pengujian secara parsial dengan menggunakan Uji t menunjukkan bahwa opini audit BPK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, karena nilai $|t \text{ hitung}|$ sebesar 1,835 $>$ t tabel 1,690 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. maka hipotesis kedua tidak dapat diterima atau ditolak. Jadi, opini audit BPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat.

Opini hasil pemeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilakukan oleh BPK menunjukkan tingkat kewajaran dan kesesuaian LKPD terhadap standar akuntansi yang berlaku. Opini audit BPK dapat menjadi tolak ukur untuk menilai akuntabilitas suatu pemerintah daerah. Opini ini dapat menaikkan ataupun menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas laporan atas pelaporan yang disajikan oleh pemerintah daerah.

Analisis dari hasil opini audit BPK yang baik tidak menjadi jaminan bagusnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) hanya menilai tata kelola keuangan yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), apakah yang dibuat oleh pemerintah daerah telah dibuat dengan sewajarnya dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Penelitian sejalan dengan penelitian Angelina & Irsutami (2012) bahwa opini audit BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Sedangkan penelitian Achmad (2017) yang menyatakan bahwa bahwa opini audit BPK berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Semakin baik opini audit maka semakin mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dibandingkan dengan pemerintah daerah yang mendapatkan opini TW (Tidak Wajar) dan TMP (Tidak Memberika Pendapat).

4.8.3 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah dan Opini Audit BPK Secara Simultan

Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ke tiga (H3) pada penelitian ini dapat dilihat pada nilai F dan nilai signifikansi variabel. Dari hasil analisis data pada tabel diatas diperoleh nilai F hitung sebesar $12,869 >$ dari F tabel $3,27$ dan signifikansi $0,000 <$ dari taraf signifikansi $0,05$. Artinya nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel dan nilai signifikansinya lebih kecil dari $0,05$. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran pemerintah daerah dan opini audit BPK berpengaruh simultan terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Kedua variabel independen dalam penelitian ini secara simultan memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan nilai *R Square* yang diperoleh sebesar $0,424$ atau $42,4\%$. Hal ini berarti bahwa variabel independen yaitu Ukuran pemerintah daerah dan Opini Audit BPK menjelaskan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar $42,4\%$, Sedangkan sisanya sebesar $57,6\%$ diterangkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam model ini.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah dan opini audit BPK terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah di Seluruh Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2016-2017. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Ukuran pemerintah daerah menggunakan total aset dapat membantu kegiatan operasional pemerintah daerah yang diiringi dengan meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin tinggi kinerja keuangan

pemerintah daerah tersebut.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit BPK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Opini hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilakukan oleh BPK menunjukkan tingkat kewajaran dan kesesuaian LKPD terhadap standar akuntansi yang berlaku.
3. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan bahwa ukuran pemerintah daerah dan opini audit BPK mempunyai pengaruh signifikan terhadap

Kineja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat.

5.3 Saran

Penelitian selanjutnya mengenai tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang penting untuk dikembangkan dan diteliti lebih jauh lagi kerana masih sangat jarang dilakukan. Dengan mempertimbangkan hasil yang diperoleh dan keterbatasan penelitian, maka penelitian menyarankan hal-hal seperti berikut ini:

1. Untuk penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data laporan keuangan pemerintah daerah dengan periode waktu yang lebih panjang sehingga lebih kelihatan perkembangan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Sumatera Barat.
2. Untuk penelitian-penelitian selanjutnya, sebaiknya menambahkan variabel penelitian lainnya yang diduga memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, misalnya opini audit, jumlah temuan pemeriksaan dan tingkat penyimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. (2017). *pengaruh pengukuran pemerinth daerah, intergovernmental revenue, dan hasil audit BPK terhadao kinerja keuangan oemerntah daerah.*
- Angelina, N., & Irsutami. (2012). Hubungan antara opini audit atas laporan keuangan daerah, pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.
- Badan Pemeriksaan Keuangan perwakilan Provinsi Sumatera Barat. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Tahun 2017*. <http://Padang.bpk.go.id>. Diakses pada 15 januari 2019.
- Broadbent, J., Michael Dietrich, dan Richard Laughlin. 1996. The Development Of Principal - Agent, Contracting and Accountability Relationship In The Public Sector : Conceptual And Cultural Problem. *Critical Perspective on Accounting*,7:259 - 284.
- Ghozali, H.Imam. (2011). Aplikasi Analisis Mulivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jensen, M. C. dan W. H. Meckling. 1976. Theory Of the Frim : Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Finacial Economics* 3:305-360.
- Kusumawardi. (2012). Pengaruh size, kemakmuran, ukuran legislatif, leverage terhadap kinerja keuangan pmerintah daerah di Indonesia, *1*(1).
- Maiyora, G. (2015). Pengaruh karateristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota (studi empiris kabupaten/kota di pulau Sumatera), *2*(2), 1–15.
- Mashun, M. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (Pertama). Yogyakarta: BPFE.
- Moe, T. M 1984. The New Economic of Organization. *American Journal of Political Science*, 28(4):739-777.
- Mustikarini, W. A., & Fitriasari, D. (2012). Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabuaten/Kota di Indonesia, *2004*(32).
- Nuryaman, Veronica Chiristina. 2015. *metodologi Penelitian Akuntansi dan BisnisTeori Dan Praktik*. Bandung: Ghalalia Indonesia.

Nst, Rizky, H. (2017). *Pengaruh ukuran pemerintah, kemakmuran pemerintah, ukuran legislatif, dana transfer pemerintah pusat dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah Peraturan Pemerintah

No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 71 Tentang Standar Akuntansi (SAP)

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah

Sari. (2016). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, pad, leverage, dan perimbangan dan ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (studi empiri kab/kota pulau sumatera), 679–692.

Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, Bandung. cetakan kesembilan, Alfa Beta,. Kesembilan.* Bandung: Alfa Beta.

Sularaso, H. (2011). Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi, 1 No.2.*

Sumarjo, H. (2010). *Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Indonesia).*

undang Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerinah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang Dasar Negara Repblik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang No. 23

Thaun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kuangan Negara

Undang-undang No. 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang
No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tetang Keuangan Negara Undang-undang No. 1
Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara Undang-undang No. 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara.



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M)
Kampus I Jln. Jendral Sudirman No. 6 Telp. 0755-20565
Kampus II Jln. Raya Koto Baru No. 7 Kec. Kubung Kab. Solok Telp. 0755-20127

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITIAN

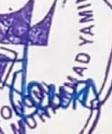
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Siska Yulia Defitri, SE. M.Si
NIDN : 1023078301
Pangkat/Golongan : Penata TK I / III d
Jabatan Fungsional : Lektor

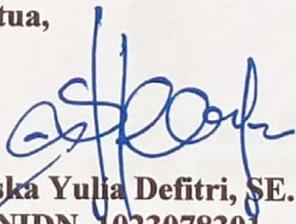
Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul: **Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Badan Pemeriksaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Empiris LKPD Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat)**, yang dilakukan pada tahun akademik 2018/2019, bersifat **original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.**

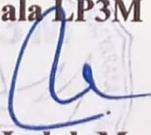
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas UMMY.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Solok, 02 Agustus 2019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

(Juji Sukraini, SE. M. Si)
NIDN. 1017116201

Ketua,

(Siska Yulia Defitri, SE. M.Si)
NIDN. 1023078301

Menyetujui,
Kepala LP3M UMMY

(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE. MM)
NIDN: 1019017402